



Ahok-Dewan Kembali Bersitegang

Terkait Masuknya Anggaran 'Siluman' Rp 8,8 Triliun pada RAPBD DKI 2015

SALING serang kembali terjadi antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan kalangan DPRD DKI Jakarta. Kali ini terkait tudingan Basuki, bahwa dewan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran 'siluman' senilai Rp 8,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015.

"Makanya saya marah, tapi mereka nggak mau ngaku. Bilangnya nggak tau apa-apa. Saya panggil Bappeda, BPKD, sama sekda nggak ada kompromi. Jadi kalau mau berantem, berantem aja. Saya udah kasih tahu Pak Pras (Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi), saya yakin masih ada anggota DPRD DKI yang baik," tegas juga mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Namun, Ahok tidak mengetahui siapa saja oknum yang mendalangi pengajuan dana sebesar itu. Untuk itu, Senin (19/1) dirinya bersama para anggota legislatif Kebon Sirih (sebutan anggota DPRD DKI, Red) akan menggelar pertemuan guna membahas kembali masalah anggaran 'siluman' tersebut.

Akibat tidak tercapainya kesepakatan pengesahan RAPBD 2015 yang dijadwalkan pekan lalu. Lantaran Paripurna RAPBD 2015

"Kita udah susun, selesai. Tiba-tiba nggak tau dari mana, dari DPRD tidak diakui! Kirim

surat kepada kami bilang ada titipan dari DPRD DKI nih, tentang visi misi. Ternyata ditaruh di anggaran Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)," ujarnya di SME Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kemarin (18/1/).

Pejabat yang akrab disapa Ahok itu mengaku kesal, dengan pengajuan anggaran yang disusun dalam bungkusan surat visi misi itu. Apalagi maksud diajakannya anggaran 'siluman' tersebut, untuk sosialisasi surat keputusan (SK) Gubernur DKI.

"Judulnya visi misi, isinya itu suruh kita ubah masukin Rp 8,8 triliun. Versinya mereka. Sosialisasi SK Gubernur DKI saja Rp 46 miliar setahun, gila nggak? Apa yang mau disosialisasi SK gubernur?" cetusnya. Meski begitu, menurut Ahok juga, dewan kemungkinan tidak akan mengakui pengajuan anggaran 'siluman' itu.

"Tapi pasti dia nggak mau ngaku. Ya saya perintahkan nggak boleh diganti. Bappeda kan nggak bisa isi lagi, kan udah *e-budgeting*. Makanya nggak heran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ketemu 2 kali," paparnya juga. Ahok lantas memanggil Kepala Bappeda DKI, Kepala BPKD DKI, dan Sekda DKI.

yang semula dijadwalkan akan digelar Jumat (16/1), batal terlaksana diduga terkait masuknya anggaran Rp 8,8 triliun tersebut.

Menanggapi tudingan Ahok, kalangan DPRD DKI langsung meradang. Mereka tidak terima disebut sebagai penyebab munculnya anggaran siluman yang disebut-sebut Ahok. "Ahok harus membuktikan ucapannya! Kita ini belum membahas anggaran, baru KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara, Red). Bagaimana bisa memasukan anggaran," ketus Prabowo Sudirman, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra.

Dia juga menjelaskan, DPRD DKI memiliki hak *budgeting*. Yakni, mengusulkan anggaran yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, tetap melalui pihak eksekutif. "Kalau Ahok tidak mau dewan memberikan usulan *budgeting*, berarti dia tidak mengerti tugas dan fungsi dewan dong," sindirnya.

Lebih jauh, Prabowo mengaku tersinggung dengan tudingan Ahok. Untuk itu, dirinya meminta Ahok menjelaskan ucapannya tersebut. "Terus terang kami merasa tersinggung disebut sebagai pihak yang memasukan anggaran 'siluman' dalam APBD DKI 2015," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Amir Hamzah, dan juga Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (Infra), Agus Chaerudin memberikan komentar terkait persoalan dana 'siluman' yang masuk dalam RAPBD DKI 2015 tersebut. Menurut Amir, carut marutnya penyusunan RAPBD DKI 2015, disebabkan kesalahan dari kedua belah pihak.



Yakni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD DKI. Sebab, kedua lembaga ini tidak mau melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pembahasan RAPBD 2015.

Sehingga, belakangan muncul berbagai persoalan, termasuk tuduhan anggaran siluman Rp 8,8 triliun. "Saya tegaskan, kesalahan bukan hanya di DPRD. Namun juga di Pemprov DKI. Kenapa? Karena mereka tidak mau melibatkan KPK dan BPK," terang Amir.

Dijelaskan Amir juga, Pemprov DKI punya tim anggaran, untuk menyusun KUAPPAS. Mulai dari Bappeda, BPKD, dan Sekda. Namun, sayangnya KPK dan BPK tidak dimasukkan. "Kalau pembahasan APBD menyimpang, kesalahan Ahok sendiri dong," katanya juga.

Karena itu, Amir menyarankan agar Ahok tidak memaksakan menggunakan APBD 2015. Namun, segera mengganti dengan menggunakan plafon anggaran APBD DKI 2014 lalu. "Kalau tetap dipaksakan hasilnya tidak akan baik," ucapnya juga.

Sementara itu, Agus Chaerudin, mengaku sudah memprediksi bakal muncul anggaran siluman dalam RAPBD 2015. Itu berdasarkan kajian yang sudah dilakukan Infra selama ini. "Terakhir kami mengkaji besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) 2014. Kami pun memprediksi, Silpa itu bakal menjadi bancakan atau permainan oknum tertentu. Sekarang terbukti, munculnya anggaran siluman Rp 8,8 triliun," cetusnya. (wok)